TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh : Dwi Budiati, S.H., M.Hum
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan)

Abstraksi

Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut sejalan dengan sikap jujur dan bertanggung jawab pelaku usaha dari berbagai praktek niaga. Tidak jujur dan mengabaikan tanggung jawab, kecuali tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemegang sahamnya merupakan pengalaman yang umum terjadi.

Di lihat dari penegakan hukumnya, hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara perdata maupun pidana, melalui Peradilan Perdata maupun Peradilan Pidana. Untuk itu tidak lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya seorang konsumen yang dirugikan haknya dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan dan sebaliknya dalam hal tertentu seorang produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana.

Kata kunci : Tinadak Pidana, Pengusaha, Konsumen dan Perlindungannya.

Abstraction

Consumer Protection Act to balance consumers' bargaining power with business actors and encourage business actors to be honest and responsible in conducting their business. This is in line with the honest and responsible attitude of business actors from various commercial practices. Being dishonest and ignoring responsibilities, unless the responsibility of the business actor towards his shareholders is a common experience.

In view of law enforcement, consumer rights can be upheld both civil and criminal, through the Civil Court and Criminal Court. For this reason it is inseparable from the Civil Code and HIR Laws and the Criminal Law Acts with the Criminal Procedure Code. This means that a consumer whose rights are impaired can file a claim for compensation by submitting a lawsuit to the Court and vice versa in certain cases a producer who incurs a loss to the consumer can be held criminally liable.

Keywords: Criminal Crimes, Entrepreneurs, Consumers and Their Protection.

A. Pendahuluan

Sebelum perlindungan konsumen secara tegas dikenal dan berkembang pengertian konsumen lebih cenderung identik dengan pengertian masyarakat dalam perkembangan hal-hal yang menyangkut masalah industry, perdagangan, keseatan dan keamanan, perundang undangan yang disusun pada waktu itu , pada setiap konsiderannya menyebutkan kepentingan masyarkat ataupun kesehatan rakyat/warga Negara dalam pengertian yang luas, termasuk didalamnya pengertian konsumen.

Secara klasik telah ditemukan dua macam hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. Umumnya yang termasuk ke dalam kelompok hukum publik adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengandung/memuat No. rma-No. rma kepentingan umum. Karena itu hukum publik sering diartikan sebagai jenis hukum yang mengatur kepentingan hukum yang bersifat umum, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan hukum yang bersifat perorangan. Menurut Nasurion¹ pada perbedaan-perbedaan itu tidak terdapat maksud-maksud untuk memisahkan hukum publik dan huum perdata satu sama lain. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain :

1. Tentang sifat kepetingan umum yang mewarnai hukum publik, dan kepentingan perseorangan yang mewarnai hukum perdata (hukum

¹ Nasurion, A., 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Daya Widya, 1999), hal. 113.

publik untuk kepentingan Romawi dan hukum perdata untuk kepentingan perorangan).

2. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan, dan pelaksanaan orang-orang pribadi tersebut, sedangkan hukum publik adalah aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan umum sehingga yang melaksanakan adalah alat-alat pemerintah.
3. Hukum perdata adalah hukum yang umum berlaku yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku orang dalam masyarakat pada umumnya, sedangkan hukum publik memuat dari aturan-aturan yang menyimpang aturan-aturan umum tadi yang merupakan tugas-tugas atau kewajiban Negara dan mengakibatkan hak-hak perorangan dicampuri oleh alat perlengkapan Negara.

Mengikuti pembagian hukum secara klasik di atas, maka tempat hukum perlindungan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dilihat dari cakupan materinya, yang mempersoalkan standar kontrak dan tanggung jawab produk, maka hukum perlindungan konsumen masuk ke dalam kelompok hukum privat karena kedua masalah tersebut mempersoalkan hak-hak privat (hak keperdataan) dari konsumen yang timbul sehubungan dengan memperoleh dan memakai produk. Akan tetapi, dilihat dari konteks hidup bernegara yang berwawasan pembangunan yang menuju kesejahteraan bersama (welfare state), maka No. rma-No. rma hukum publik pun ikut dipertahankan sebab bagaimanapun juga seorang konsumen adalah warga negara, merupakan sumber daya pembangunan yang perlu dijaga kualitas hidupnya, sehingga mampu mampu melanjutkan kesinambungan pembangunan suatu negara.

Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen juga termasuk ke dalam hukum publik.²

Seiring dengan fungsi Negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, maka dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, pemerintah memegang peranan sentral, yaitu pemerintah harus dapat mengusahakan terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan konsumen dengan baik melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi terpenuhinya hak-hak konsumen dengan baik melalui pembuatan peraturan-peraturan yang baik (fungsi regulasi) dan melaksanakan (mengawasi pelaksanaan) peraturan tersebut sebaik-baiknya (fungsi penegakan hukum). Mengikuti pemikiran defence sociale yang berkembang sejak akhir abad ke 19, yaitu dengan adanya upaya yang menjadikan hukum sebagai social engineering dan tidak lagi hanya sebagai alat pembalasan semata-mata maka penerapan hukum pidana di dalam penegakkan hukum perlindungan konsumen dapat diterima sebagai cara untuk mengarahkan masyarakat ke penataan hukum yang lebih baik.

B. Pembahasan

1. Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Pidana

Pada dasarnya di samping mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam undang Undang Perlindungan Konsumen ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen yang

² Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 56.

menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, perbuatan produsen yang merugikan / melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan No. rma-No. rma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana.³

Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila di lain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Berdasarkan uraian di atas, nampak pemerintah telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian pembangunan nasional. Kunci pokok terhadap masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan produsen (pedagang produk atau pengusaha) saling membutuhkan. Sehingga hubungan antara produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.

³ Ibid., hal. 59.

Di Negara berkembang, termasuk Indonesia, kepentingan konsumen sering dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya, baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Pada umumnya suara pelaku usaha jauh lebih keras sehingga mudah di dengar oleh pemerintah. Konsep pertumbuhan ekonomi suatu Negara yang berwawasan integral bukan untuk memakmurkan sekelompok masyarakat, melainkan seluruh rakyat termasuk di dalamnya konsumen.

Seiring dengan kian majunya sector industry, kesadaran konsumen akan hak-haknya pun semakin bertambah, walaupun bukan tanpa masalah. Pembangunan perekonomian nasional mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang tinggi. Menyikapi hubungan konsumen dengan pelaku usaha itu perlu dipahami doktrin atau teori yang mendasari adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam sejarah mencakup dua macam doktrin, yaitu doktrin caveat emptor yang kemudian berkebang menjadi caveat venditor. Maksud dari doktrin ini adalah bahwa pada awalnya doktrin tersebut menekankan pada keadaan konsumen sendiri untuk melindungi dirinya, namun pada akhirnya terjadi pergeseran bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen atau pelaku usaha berhati-hati atas produk yang ditawarkan.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru. Awalnya konsep tersebut dimulai di negara maju, kemudian merebak ke dunia lainnya. Di Indonesia belum ada perangkat peraturan perundang-

undangan khusus mengenai perlindungan konsumen, meskipun usaha ke arah itu sudah dilakukan sejak lama. Belum adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex specialis*) dan terpadu mengenai perlindungan konsumen ini, bukan berarti peraturan tentang perlindungan konsumen belum ada. Peraturan tentang konsumen sudah ada, tetapi terpecah di sana sini atau tidak merupakan satu konsep utuh.

Banyak hak yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan dan sebagainya. Hal ini tidak saja merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian, di samping dapat menimbulkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relative masih rendah.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakekatnya berfungsi sebagai :

- a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar.
- b. Pemulihan atas kerugian materil maupun immaterial yang telah dideritanya.
- c. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam :

- a. Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.

b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan / atau jiwa konsumen⁴ (Sutedi, 2008 : 37).

Pelaku usaha atau seseorang yang melakukan perbuatan curang terhadap publik dalam menawarkan barangnya dapat dijatuhi penjara atau denda, kalau : 1). Terjadi satu perbuatan yang bersifat menipu, 2). Karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pesaingnya dan pembeli atau konsumen. Dalam kasus seperti ini, adanya kasus penipuan atau perbuatan curang haruslah terbukti.

Proses hukum yang adil dan layak (*due process of law*) dianggap sudah selesai, ketika putusan pengadilan pidana sudah dieksekusi. Sebab-sebab atau akibat-akibat tindak pidana (kejahatan) pada korban tindak pidana korporasi, tidak dihiraukan. Biaya-biaya social akibat tindak pidana (kejahatan) itu, misalnya : penderitaan dan kerugian korban serta berbagai stigma terhadap korban, belum atau tidak terakomodasi. Di mata hukum , peran korban yang diwakili oleh jaksa/penuntut umum hanyalah terbatas menjadi “saksi korban”, sebutan yang lazim digunakan dalam praktek penegakan hukum, baik pada kasus penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

Pasal 108 KUHAP menyebutkan, “Setiap orang yang mengalami, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik, dan penyidik, baik lisan maupun tertulis”. Sedangkan pasal 160 ayat (1) butir b KUHAP menentukan “ yang pertama-tama didengar

⁴ Sutedi, Andrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hal. 37.

keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Hal ini berarti keterangan saksi korban, baik di penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan mungkin saja merupakan bukti yang paling membahayakan bagi tersangka atau terdakwa. Seorang saksi korban yang memberikan keterangan dalam setiap tingkat proses peradilan pidana berarti sudah memperhitungkan untung ruginya memberikan keterangan.

Menurut David Tench dalam Sidabalok (2010 : 60)⁵ kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi perilaku-perilaku curang para pelaku ekonomi, khususnya berkaitan dengan penegakkan hak-hak konsumen. Bahkan, lebih jauh dikatakan bahwa kehadiran hukum pidana merupakan keharusan dalam menegakkan hak-hak konsumen. Kecenderungan dalam menetapkan ketentuan pidana dalam setiap perundang-undangan di setiap bidang hukum khususnya bidang hukum ekonomi, yang umumnya dimuat dalam bagian akhir dari undang undang tersebut, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendali dapat diterima.

C. Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen

Hukum pidana termasuk dalam katagori hukum publik. Dalam katagori ini termasuk pula Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara dan Hukum Internasional. Di antara semua aspek hukum publik itu, yang paling banyak menyangkut perlindungan konsumen adalah Hukum pidana dan Hukum Administrasi Negara. Penerapan norma-norma Hukum Pidana, seperti termuat dalam KUH Pidana maupun di luar KUH Pidana, sepenuhnya diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberikan wewenang oleh undang undang untuk itu, yakni undang Undang

⁵ Loc. Cit., Sidabalok, hal. 60.

No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menetapkan setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Di samping polisi, Pegawai Negari Sipil tertentu juga diberi wewenang khusus untuk melakukan tindak penyelidikan. Penerapan KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana oleh badan badan tata usaha negara memang menguntungkan bagi perlindungan konsumen. Oleh karena itu, keseluruhan proses perkara menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Konsumen yang karena tindak pidana tersebut menderita kerugian, sangat terbantu dalam mengajukan gugatan perdata ganti ruginya. Berdasarkan hukum atau kenyataan, beban pembuktian yang diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata sangat memberatkan konsumen. Oleh karena itu fungsi perlindungan sebagai kepentingan konsumen penerapannya perlu mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pembuktian peristiwa atau perbuatan melanggar hukum pelaku tindak pidana. Hukum pidana baik yang termuat di dalam KUH Pidana maupun di luar KUH Pidana itu, merupakan sumber-sumber hukum penting dari hukum konsumen dan / atau Hukum Perlindungan Konsumen, sebagaimana diketahui tiap aturan pidana berlaku terhadap setiap orang dan/atau Badan Usaha yang berada di Indonesia. Tetapi untuk kejahatan-kejahatan dan/atau pelanggaran tertentu tiap orang di luar Indonesia juga dapat dikenakan tindak pidana tertentu berdasarkan KUH Pidana Indonesia.

Beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan sebagai tindak pidana yang sangat berkaitan dengan kepentingan konsumen yang termuat dalam

KUH Pidana maupun yang terdapat di luar KUH Pidana adalah sebagai berikut :

1. Dari KUH Pidana

Beberapa pasal KUH Pidana akan dibahas dengan menggambarkan kaitannya pada hukum konsumen dan/atau Hukum Perlindungan Konsumen.

1.1 Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana

Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana menyatakan “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan hukum pidana dalam undang undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana ini memuat asas hukum pidana bagi Indonesia yang meniadakan hukum apapun padad setiap orang, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Adagium terkenal mengenai ketentuan ini berbunyi “Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenale” yang berarti tiada hukum tanpa adanya undang undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Ketentuan ini sangat penting, sehingga suatu undang undang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan. Terlebih banyak perbuatan-perbuatan dan atau perilaku dalam bidang penyediaan barang dan atau jasa yang tidak jelas apakah dapat dijatuhi hukuman pidana atau tidak, apabila dijalankan oleh pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan asas tersebut di atas maka seseorang atau badan hukum jika melakukan kejahatan tidak akan dapat dijerat dengan hukum apabila tidak ada suatu aturan atau undang undang yang mengaturnya. Sehingga kehadiran dari Undang Undang

Perlindungan Konsumen sangat membantu terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hak-hak konsumen akan dengan mudah mendapatkan perlindungan hukum. Namun hal ini harus diimbangi dengan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya maupun terhadap kewajiban-kewajibannya. Tiada hukum yang dapat dijatuhkan atas diri seseorang apabila tidak ada Undang Undang yang menetapkannya demikian, lebih menjadi perlindungan yang keliru atas mereka yang telah berbuat hal-hal yang merugikan pihak lain. Karena itu, perlu ditegaskan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pengusaha sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun 1999.

1.2 Pasal 4 ayat (2) dan (3) KUH Pidana

Berbagai perbuatan pidana tertentu tidak saja yang dilakukan di dalam negeri, tetapi juga yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, dapat dihukum berdasarkan KUH Pidana. Diantaranya ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) KUH Pidana. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “Suatu kejahatan tentang uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank, ataupun tentang materai atau merk yang dikeluarkan atau digunakan oleh Pemerintah Indonesia.”

Pasal 4 ayat (3) menyatakan : “Pemalsuan tentang surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang atas tanggungannya Indonesia, daerah atau berbagai daerah, talon-talon, surat-surat deviden.”

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3) KUHPidana ini dapat disimpulkan bahwa baik orang yang berada di Indonesia, bahkan juga untuk tindak pidana tertentu, orang-orang yang berada di luar Indonesia dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tertentu itu. Ketentuan Pidana tertentu Indonesia juga berlaku terhadap orang-orang yang berada di luar Indonesia adalah tentang antara lain mata uang Pemerintah Indonesia atau mata uang bank, meterai dan merk yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, surat-surat utang atau sertifikat utang yang palsu atau surat-surat lainnya yang juga palsu. Jadi setiap konsumen yang menerima uang rupiah palsu dan atau surat-surat utang palsu asal luar negeri dapat mengajukan perbuatan tindak pidana terhadap pelaku di luar Indonesia tersebut pada pihak Kepolisian wilayah yang berwenang atasnya⁶ (Nasution, 1999 : 42).

1.3 Pasal 202 KUHPidana

Pasal ini berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena perbuatan itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara

⁶ Nasution, 1999 : 42

seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh Tahun.

- (2) Dari pasal ini terlihat bahwa setiap orang yang menyebabkan air untuk kepentingan (minum) umum menimbulkan bahaya pada kesehatan tubuh atau bahkan nyawa orang lain, diancam dengan hukuman penjara. Perbuatan memasukkan sesuatu barang ke dalam air itu dapat saja terjadi dengan cara memasukkan racun atau bahan-bahan lainnya.

Kemudian pasal 203 KUH Pidana juga mengatur perbuatan yang sama dengan pasal 202 KUH Pidana, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan (kealpaan) belaka. Jadi terjadinya perbuatan bukan karena disengaja, tetapi karena kealpaan atau kurang hati-hatiannya pelaku. Perbuatan ini diancam dengan hukuman yang lebih ringan , yaitu pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda Rp. 4.500. Tetapi apabila korban meninggal dunia pelaku diancam hukuman pidana penjara setahun empat bulan atau kurungan setahun.⁷ (Nasution, 1999 : 143).

Kegiatan pelaku usaha (produsen) yang memasukan racun atau bahan-bahan lainnya banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ikan yang diformalin, bakso dan tahu yang dicampur dengan borak atau gula

⁷ Loc. Cit., Nasution, hal. 143.

merah yang dicampur dengan borak dan sebagainya. Produk yang dicampur dengan formalin atau borak tersebut banyak kita jumpai pada barang yang diproduksi tanpa mempergunakan label. Tindakan pelaku usaha/produsen tersebut bertentangan dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan maupun Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

1.4 Pasal 204, 205 dan 206 KUH Pidana

Pasal ini mengatur tentang berbagai bentuk atau macam barang dan jasa. Pasal 204 KUH Pidana berbunyi :

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh Tahun.

Pasal ini mengatur perilaku seseorang yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan pada orang lain barang yang diketahuinya dapat membahayakan nyawa atau kesehatan tubuh orang tersebut. Padahal tentang bahaya

yang dapat mengancam nyawa/kesehatan seseorang lain itu tidak diberitahukannya kepada orang yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 205 KUH Pidana mengatur tentang perbuatan yang hampir sama tetapi dilakukan karena kesalahan (kealpaan). Perbedaannya dengan ancaman 204 KUH Pidana adalah pada perbuatan sengaja dan ancaman hukumannya lebih berat dari pada pelanggaran pasal 205 KUH Pidana.

Sedangkan dalam pasal 206 KUH Pidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam bab tersebut, yang dipersalahkan melanggar ketentuan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa larangan untuk menjalankan pekerjaan yang dijalankannya dan atau hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan⁸. Pasal 204, 205 dan 206 KUH Pidana dimaksudkan adalah jika pelaku usaha melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan pelaku usaha itu mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan si pemakai barang dimana pihak pelaku usaha (produsen) tidak mengatakan atau menjelaskan tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut. Akan tetapi, jika pelaku usaha yang akan menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, mengatakan terus terang kepada konsumen tentang sifat bahayanya itu maka tidak dikenakan pasal ini. Dalam UUPK

⁸ Ibid., hal. 144

hal ini tercantum dalam pasal 18 yang lebih dikenal dengan klausula baku.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UUPK klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dari ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakannya sesuai dengan ketentuan undang undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai standar kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPK akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen yang setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang

yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

Setelah lahirnya UUPK, maka perlindungan konsumen dari penyalahgunaan keadaan semakin baik karena berdasarkan pasal 18 UUPK, dilarang memuat klausula-klausula baku tertentu dalam perjanjian antara konsumen dengan produsen. Pembatasan atau larangan untuk memuat klausula-klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.

1.5 Pasal 382bis, Pasal 383, Pasal 386, Pasal 387 dan 390 KUHPidana.

Pasal 382bis KUHPidana mengatur tentang persaingan yang curang, di mana pelaku usaha melakukan suatu perbuatan menipu konsumen, baik konsumen itu terdiri atas publik atau seorang yang tertentu. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan di dalam perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Sedangkan pasal 383 KUHPidana mengenai perbuatan penjualan yang menipu pembeli, misalnya saja mutu suatu barang di mana penjual menjual barangnya yang sudah lama kepada pembeli dan mengatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut adalah barang baru.

Pasal 386 KUHPidana mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh penjual dengan menjual barang palsu dan

kepalsuan tersebut disembunyikan oleh pihak penjual. Misalnya penjual mencampur minuman dengan bahan-bahan lain sehingga harga maupun gunanya dapat berkurang. Pasal 387 KUHPidana mengatur tentang perbuatan penipuan yang dilakukan pihak pemborong atau ahli bangunan yang dapat membahayakan jiwa orang lain, misalnya gedung yang baru dibangun roboh karena tidak kuatnya pondasi bangunan. Kemudian pasal 390 KUHPidana mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, menyiarkan kabar bohong dengan cara mempromosikan atau mengiklankan harga atau tarif suatu barang atau jasa, tanggungan atau jaminan, hak ganti rugi atas suatu barang dan jasa, adanya penawaran potongan harga atau hadiah yang menarik.

Pengguna barang dan/atau jasa dalam UUPK tersemat dalam pasal 19, di mana dalam pasal tersebut di atas tentang tanggung jawab pelaku usaha. Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Secara umum tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang

dialami oleh konsumen sebagai akibat pengguna produk, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa dapat didasarkan pada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan melanggar hukum⁹. (Miru, 2004:127).

2. Peraturan Per-Undang-Undangan di Luar KUHP.

Ketentuan-ketentuan pidana juga dapat ditentukan dalam berbagai peraturan perundang undangan di luar KUHP, di antaranya adalah: 2.1 Pasal 80-86 Undang-Undang No. 23/1992 memuat 21 ayat dan mengatur tentang:

- a. Tindakan medis terhadap ibu hamil (ayat 1).
- b. Menghimpun dna untuk pemeliharaan kesehatan tidak berbenuk badan hukum, tidak memiliki ijin operasional serta tidak menjalankan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat2 dan ayat 3.
- c. Perilaku sengaja pembuatan dengan tujuan komersial mengenai transplantasi organ tubuh, jaringan tubuh atau transfusi darah.
- d. Mengadakan makanan dan minuman dan memproduksi dan atau mengadakan persediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat ‘*farma hope*’ dan standar baku lainnya.

Dari sisi ketentuan ini terlihat perbuatan medis yang langsungkan itu adalah melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil dari tindakan medis itu tidak memenuhi pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 1992.

⁹ Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Raja Grafindo Husada, 2004), hal. 127.

Kualifikasi tindakan pidana sebagaimana di atur dalam pasal 80 dan 82 Undang Undang No. 23 Tahun 1992 ditetapkan sebagai tindak pidana kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang Undang No. 23 Tahun 1992 adalah pelanggaran.

2.2 Pasal 54-70 Undang Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 54 Undang Undang No. 14 Tahun 1992 mengacu hukuman pada pelanggarnya selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila pelanggar itu dalam berkendara bermotor :

- a. Melalui jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- b. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
- c. Tidak sesuai dengan kelas jalan.

2.3 Pasal 21 dan 22 Undang Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pengaturan masalah perumahan pun ditetapkan beberapa tindakan yang dikualifikasikan tindak pidana, baik sebagai tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Inti dari pasal 1 Undang Undang No. 16 Tahun 1985 adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 6, pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) Tahun atau denda setinggi tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.
3. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana penjara selama lamanya 1 (satu) Tahun atau denda setinggi tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Perbuatan sebagaimana di maksud dalam ayat (3) adalah pelanggaran.

2.4 Pasal 61-63 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 sebagai perlindungan konsumen.

Pada Undang Undang Perlindungan Konsumen terdapat 3 pasal berturut turut yang mengatur tindak pidana dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu pasal 61, 62 dan 63. Pasal 61 Undang Undang Perlindungan Konsumen berbunyi : “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya”. Pasal 61 Undang Undang Perlindungan Konsumen jelas memperlihatkan suatu bentuk pertanggung jawaban produsen yang tidak saja dapat dikenakan kepada pengurus tapi juga kepada perusahaan. Hal ini menurut Nurwadjito dalam Miru¹⁰ (2004:276) merupakan upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen melalui pasal ini perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.

¹⁰ Loc. Cit., Miru, hal. 276.

Sedangkan pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pelaku usaha yang melanggar suatu pasal 8 sampai dengan pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen ini memberlakukan 2 aturan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Sementara itu diluar tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana yang tersebut dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatui hukuman tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim.
- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Permintaan penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
- f. Pencabutan ijin usaha.

Dengan demikian pelaku tindak pidana tertentu disebut dalam pasal 62 dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, dapat pula dijatui hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menetapkan perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kunci pokok dari masalah perlindungan konsumen adalah konsumen dan produsen atau pelaku usaha saling membutuhkan. Pengaturan ketentuan mengenai tindak pidana dibidang perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru. Di Indonesia hukum ada perangkat peraturan perundang undangan yang khusus mengenai tindak pidana dibidang perlindungan konsumen, meskipun usaha diarah itu sudah dilakukan sejak lama. Belum adanya perangkat perundang undangan yang khusus dan terpadu mengenai tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, bukan berarti pusat tentang tindak pidana perlindungan konsumen belum ada. Peraturan tersebut sudah ada, tetapi belum terpadu sebagai satu kesatuan hukum.

Hal yang mewarnai permasalahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan hukum yang disediakan, prosesnya tidak cepat, tidak sederhana dan berbiaya tinggi. Perkembangan sosial ekonomi dan teknologipun sudah berkembang jauh dari saat-saat perundang-undangan umum itu disusun. Sehingga benar undang-undang khusus tentang tindak pidana di bidang perlindungan konsumen merupakan kebutuhan mutlak rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Husada, 2004).
- Nasurion, A., 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Daya Widya, 1999).
- R Soesilo, *KUH Pidana Serta Komentar-komentarnya*, (Bandung : Karya Nusantara, 1985)
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010).
- Sutedi, Andrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008).